

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran Masyarakat

##### 1. Peran

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Peran diartikan sebagai pemain sandiwara (film) , tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain, artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang

Menurut Soekanto (2009 : 212-213) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada lain dan saling berkaitan.

Menurut Berry (200 : 105) menyebutkan bahwa peran sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.

Apabila seseorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang dia miliki, berarti dia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin dipisahkan. Asanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. Siagian (2012 : 212)

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktifitas yang dilakukan oleh seorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seorang atau sekumpulan orang tersebut.

## B. Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu- individu atau suku yang berbeda dengan satu dan lainnya, yang menenpati suatu tempat atau daerah yang tidak terlalu jelas batas-batasannya dan saling berinteraksi dan bekerja sama guna untuk memperoleh kepentingan bersama.

Masyarakat menurut istilah bahasa inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan), sedangkan istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).

Menurut (Soekamto,2012) masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu, kontak sosial dan komunikasi

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat yang tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan terikat oleh rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: 1. Interaksi antar warga-warganya, 2. Adat istiadat, 3. Kontinuitas waktu, 4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warganya (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka penulis menyimpulkan masyarakat arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa inggris disebut *society*, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan identitas, budaya, dan wilayah juga mempunyai kebiasaan yang disebut tradisi dan semua itu diikat oleh kesamaan.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Masyarakat

Peran seerta masyarakat adalah ikut terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah kegiatan, contohnya adalah peran masyarakat dalam bidang sosial yaitu kegiatan memperingati ulang tahun kemerdekaan. Dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif dalam memikirkan, merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program-program kegiatan yang telah dibentuknya bersama. Sedangkan lembaga atau wadah yang ada di masyarakat hanya dapat memotivasi, mendukung dan membimbingnya. (Notoadmojo, 2007).

### a. Motivasi

Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan pada diri seseorang untuk bertindak, dimana jika seseorang tidak mau bertindak atau berbuat sering kali disebut orang tidak memiliki motivasi. Dorongan atau alasan ini bisa datang dari orang lain atau pun diri sendiri, motivasi yang datang dari luar atau orang lain ini biasanya hanyalah sebagai pemicu timbulnya motivasi, sedangkan motivasi dari dalam adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, (Sudrajat, 2008).

Menurut Malayu (2005 : 143), Motivasi berasal dari kata latin *Movere* yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak untuk orang lain maupun diri sendiri yang bertujuan untuk menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar nantinya mereka mau berkerja sama, Bekerja dengan efektif dan terintergarsi dengan segala daya upayanya untuk bisa mencapai sebuah kepuasan.

Melihat dari beberapa pendapat diatas, Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Motivasi adalah suatu kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.

### b. Komunikasi

Komunikasi adalah bentuk kegiatan interaksi yang dilakukan seseorang dengan orang lain guna untuk menyampaikan suatu gagasan. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide atau gagasan seseorang dialihkan kepada suatu penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. (Mulyana,

2005). Sedangkan menurut Shannon & Weaver Komunikasi adalah interaksi yang dilakukan guna untuk mempengaruhi seseorang kepada orang lain baik disengaja maupun tidak.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan dimana seseorang bisa kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan dimana mereka berada dan orang lain.

### c. Koordinasi

Koordinasi adalah bentuk proses menggerakkan dan mengimbangi kelompok dengan memberikan tempat kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan semestinya diantara anggota itu sendiri. (Hasibuan,2007:85).

Sedangkan menurut ( Hasibuan (2009 : 85) koordinasi merupakan bentuk usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan suatu pelaksanaan agar menghasilkan suatu tindakan yang seragam pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan dan kkegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi dengan harapan akan mencapai tujuan organisasi secara efisien, Yahya (2006 : 95).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak atau kelompok untuk saling memberikan informasi bersama mengatur atau menyepakati hasil dari keputusan bersama.

## C. Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam suatu pemerintahan. Kebijakan dikeluarkan dan dijalankan tidak hanya sebagai formalitas saja akan tetapi kebijakan dikeluarkan memiliki tujuan dan manfaat khususnya untuk masyarakat. tujuan itu diantaranya untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya dirasa kurang maksimal. Dengan adanya kebijakan lembaga yang memiliki

wewenang dapat mengendalikan dan dapat mengatur bahkan memberi contoh kepada masyarakatnya.

Secara umum istilah “Kebijakan” atau “Policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Salah satu definisi kebijakan publik diberikan oleh Winarno (2014:20) yang menyatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat diartikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut (Syafi,2001) menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai istilah suatu kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik merupakan segala sesuatu, baik itu aturan atau keputusan yang diberikan oleh pemerintah yang untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno,2014:20). Batasan lain mengenai kebijakan publik diberikan oleh Winarno (2014:20) yang memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah dan tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu.

Menurut Winarno (2014:20) mengenai konsep kebijakan publik terdapat beberapa implikasi, yakni pertama, kebijakan publik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam sistem politik bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan telah direncanakan. Kedua, tindakan yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan berdasarkan usulan dari diri individu merupakan pengertian dari kebijakan. Ketiga, pengendalian inflasi, mempromosikan perumahan rakyat dan mengatur perekonomian dilakukan bukan semata-mata keinginan pemerintah itu sendiri melainkan implementasi dari kebijakan itu sendiri. Keempat, positif dan negatif adalah bentuk dari kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan suatu masalah oleh lembaga yang berwenang berdasarkan atas hukum yang jelas.

## 2. Tahap – tahap perumusan kebijakan

Tahap dalam perumusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan melainkan tindakan yang sebaiknya dipilih. Dalam merumuskan kebijakan harus melalui beberapa tahap yang harus dilakukan.

Menurut Winarno (2014:123-125) tahap-tahap yang harus dilakukan diantaranya;

### a. Tahap pertama” Perumusan Masalah”

Mengenalinya sebuah permasalahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam perumusan kebijakan. Agar perumusan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan maka semua masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat harus dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu seberapa besar masalah yang ada dikalangan masyarakat apabila dalam proses perumusan kebijakan dilakukan dan dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan masalah-masalah akan terselesaikan dengan tepat sasaran. Maka dari itu dalam tahap perumusan masalah para analisis kebijakan sangat membutuhkan data dan informasi untuk yang nantinya dapat merumuskan masalahnya dengan tepat dan benar. Ini adalah beberapa kendala yang sering dihadapi para peneliti dalam merumuskan masalah yaitu:

- 1) Kurang tersedianya data dan informasi yang baru (*up to date*).
- 2) Rendahnya kualitas data dan informasi yang ditemui dilapangan yang dikarenakan rendahnya kompetensi para pengumpul dan pengolah data.
- 3) Sistem manajemen data yang belum standar, yang menyangkut masalah penyajian, tata cara pengolahan, ukuran yang digunakan dan masalah klasifikasi.

### b. Tahap kedua “Agenda Kebijakan”

Tidak semua masalah bisa masuk ke tahap[pan agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akan masuk kedalam agenda kebijakan. Suatu masalah agar bisa masuk kedalam agenda kebijakan

harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Misalnya saja apakah masalah tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakatnya? Kemudian masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus kebijakan atau dibahas oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang yang tinggi dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat. masalah tersebut dibahas dan akan diselesaikan dengan urutan berdasarkan tingkat urgensinya dan untuk segera diselesaikan.

c. Tahap ketiga”Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah”

Setelah perumus kebijakan sudah mendefinisikan masalah-masalah dengan baik maka para perumus kebijakan akan sepakat untuk memasukkan masalah keagenda kebijakan dan melakukan langkah selanjutnya yaitu untuk penyelesaian masalah. Pada tahapan ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

d. Tahap keempat” Penetapan Kebijakan”

Setelah salah satu kebijakan diputuskan sebagai cara untuk memecahkan masalah, maka tahap akhir yang dilakukan adalah penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan dilakukan dengan tujuan agar kebijakan itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **D. Pengelolaan potensi batu kapur**

### **1. Pengertian pengelolaan**

Pengelolaan dapat disamakan dengan kata “management” yang berarti pengaturan dan pengrusan (Suharsimi Arikunto, 1993 :31 ), pengertian yang populer dikalangan masyarakat saat ini manajemen juga diartika sebagai peraturan, pengelolaan, dan administrasi. Jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk rangkaian pekerjaan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok orang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang memiliki tujuan tertentu.

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses cara perbuatan mengelola atau proses

melakukan suatu kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan kepada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Fath, (2004: 1) dalam proses manajemen terlibat fungsi- fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau seorang pemimpin, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan demikian manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan, upaya terstruktur dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses atau cara yang diawali dari merencanakan, pengorganisasian, pengawasan dan yang terakhir evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan supaya berjalan dengan efektif dan efisien.

Sebelum semua itu dilaksanakan pastinya haruslah ada sebuah perencanaan agar pengelolaan yang akan dijalankan menjadi sasaran dan terarah, Perencanaan pembangunan merupakan faktor penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Sebab melalui penyusunan perencanaan dapat diketahui, tujuan pembangunan, siapa yang melaksanakan pembangunan, kapan pembangunan dilaksanakan, dimana pembangunan dilaksanakan dan lain lain.

## **2. Fungsi pengelolaan**

Secara garis besar fungsi pengelolaan (manajemen) dapat disimpulkan bahwa tahap tahap dalam melakukan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. fungsi-fungsi tersebut bersifat universal, bisa terjadi dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun semua kembali lagi pada tipe organisasinya, karakter, dan anggotanya dalam sebuah organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pendapat Gie (2000: 21), yang menyatakan dalam pernyataannya bahwa dalam kegiatan atau fungsi manajemen meliputi

Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actualing*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sutarno (2004: 109), mengatakan bahwa sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa saja yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana semua itu meliputi tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai semua itu.

Perencanaan merupakan sebuah proses mempersiapkan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan untuk yang selanjutnya akan dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan akhir disebuah organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. berikut macam-macam aspek perencanaan;

- 1). Apa yang dilakukan?
  - 2). Siapa yang melakukan?
  - 3). Dimana akan melakukan?
  - 4). Apa yang diperlukan agar tercapainya tujuan bersama?
  - 5). Bagaimana cara melakukannya?
  - 6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dan dapat maksimal?
- (Arikunto, (1993: 38).

Dengan demikian letak kunci keberhasilan suatu pengelolaan atau manajemen tergantung pada bagaimana cara perencanaanya. Perencanaan adalah dasar utama sebuah proses pengelolaan, jika dalam sebuah pengelolaan tertata dengan oleh baik, maka proses selanjutnya atau tahap-tahap selanjutnya akan tersusun dan berjalan dengan baik pula begitupun juga sebaliknya. Perencanaan yang baik adalah yang rasioal, dimana dapat dilaksanakan dan menjadipanduan untuk langkah selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perencanaan adalah merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk

menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

*Organizing* berasal dari kata oraganon dalam Bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu diartikan proses pengelompokan serangkaian kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan –tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer..(Terry, Rue, 2010: 82).

Disebuah organisasi dituntut adanya kerja sama oleh seluruh anggota didalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Organisasi adalah suatu alat untuk merancang struktur formal, pengelompokan, dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan seluruh anggota dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan untuk mencapai semua tujuan tersebut perlu dipilih orang yang berkompeten dalam bidangnya atau memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah dimana keinginan untuk membuat orang lain agar mengikuti keinginannya dengan kekuatan pribadi yang dimilikinya atau menggunakan hak kekuasaan jabatan yang dimiliki secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan dalam tempo jangka panjang perusahaan. salah satu yang termasuk didalamnya adalah seorang manajer atau pimpinan memberi tahu bawahannya atau anggotanya yang harus dilakukan dengan nada bervariasi, mulai dari nada tegas, meminta atau pun bahkan mengancam dengan tujuannya adalah agar tercapainya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Pengarahan berarti pimpinan atau manajer mengarahkan, memimpin, mempengaruhi bawahan. manajer sejatinya tidak melakukan semuanya sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas melalui orang-orang yang ada dibawahnya. Para pimpinan atau manajer tidak hanya sekedar memberikan perintah, akan tetapi menciptakan suatu iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara

baik, atau bisa dikatakan memberikan contoh yang baik agar dapat tercapainya tujuan perusahaan dengan baik dan efisien.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah segenap bentuk kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwasanya tugas atau pekerjaan yang telah ditugaskan dilakukan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah atau aturan yang diberikan (Siagian, 2003: 112) .

Pengawasan atau kontroling adalah merupakan bagaian akhir dari fungsi manajemen dilaksanakan guna untuk mengetahui;

- 1). Apakah semua keinginan sudah berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan sebelumnya
- 2). Apakah dalam menjalankan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu proses kegiatan.
- 3). Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan pembekakan keuangan.
- 4). Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Berikut adalah tugas pengawasan adalah;

- 1). Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang akan menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
- 2). Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- 3). Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Dengan demikian, dalam suatu kegiatan perencanaan merupakan proses awal yang keberadaanya sangatlah diperlukan dalam memberikan arah atau sebagai patokan utama dalam sebuah kegiatan. kemudian pengorganisaian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk saling bersinergi untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

Tahapan berikutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu menjadikan perencanaan awal sebagai patoan atau pedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan pada awal, dan tahap terakhir yaitu pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring atau *controlling* dan evaluasi dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program berikutnya sehingga kedepan program yang dirasa kurang efisien bisa diperbaiki sesuai apa yang diinginkan.

### **E. Potensi batu kapur**

Salah satu sumber daya alam yang ada di Desa Sampung adalah batu kapur atau biasa masyarakat menyebutnya gamping. Batu kapur atau gamping ini adalah salah satu batu yang biasa digunakan untuk bahan campuran pada bangunan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 November 2018. Didapatkan hasil bahwa di Desa Sampung sendiri kususnya dilingkup penambangan batu kapur terdapat kurang lebih ada 50 titik tempat pembakaran batu kapur, jadi sebelum batu kapur ini dimanfaatkan sebagai bahan campuran pada bangunan maka harus di bakar terlebih dahulu dan proses pembakarannya pun memakan waktu cukup lama yaitu 2 hari 3 malam, maka dari itu warga masyarakat sekitar bekerja sebagai penambang batu kapur baik dipertambangan batu kapur dan juga ditempat pembakaran batu kapur.

## **B. KAJIAN PENELITIAN RELEVAN**

### **1. Penelitian yang pertama**

Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Agustiawan, Hery dalam jurnal Kebijakan Publik Vol 5, No 3 (2014) page. 111-114. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batu bara dibutuhkan petunjuk umum dan teknis yang jelas. Supaya dalam mengimplementasikan, pihak implementor tidak salah untuk mengkomuni kasikan kebijakan kepada

kelompok sasarannya. Dampak pembangunan pabrik batu gamping di Desa Sampung diantaranya terdiri dari dampak positif yang didukung oleh warga yang pro: dengan pendirian ada lowongan pekerjaan, memperbaiki ekonomi masyarakat pekerja/karyawan gaji UMR (Upah Minimum Regional). Dampak negatif yang didukung oleh warga yang pro: penyemaran udara, warga terkena penyakit ISPA (Infeksi Saluran Nafas Atas). Dampak negatif yang didukung oleh warga yang kontra: penyemaran udara, sulitnya air bersih, perekonomian warga mati karena adanya pembangunan pabrik batu gamping, warga terkena penyakit ISPA (Infeksi Saluran Nafas Atas).

Pembangunan pabrik batu gamping ini menimbulkan reaksi sebagian besar warga Sampung yang pro: mendukung pembangunan pabrik gamping tersebut. Pembangunan pabrik batu gamping ini menimbulkan reaksi sebagian besar warga Sampung yang kontra: menolak pabrik tersebut dikarenakan pabrik tersebut tidak memiliki ijin usaha dan ijin lingkungan, selain itu pabrik tersebut hanya dimiliki oleh badan perseorangan bukan dari pemerintah daerah, sehingga warga menolak dengan melakukan aksi demo di depan pendopo atau kantor Pemkab Ponorogo, di depan kantor (Dewan Perwakilan Daerah) DPRD Ponorogo, Aksi ini diikuti oleh beberapa perwakilan dari desa Sampung dan pabrik ditutup bulan Mei 2018.

Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan tambang batu kapur dan persoalan yang terjadi di tambang batu kapur. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya objek yang pasti berbeda. Jika sebelumnya peneliti meneliti terkait dampak pembangunan pabrik di kabupaten siakk sedangkan peneliti yang akan diteliti mengenai peran masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan batu kapur di kabupaten Ponorogo.

## **2. Penelitian yang kedua**

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, hikmawati dalam jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa partisipasi, salah satu

yang penting yang baik Unsur-unsur pemerintahan, sebagai satu konsep yang dijabarkan tidak hanya sebagai satu-satunya berpartisipasi, tetapi juga mengandung upaya untuk mengendalikan kesadaran untuk benar-benar tenggelam dalam keseluruhan proses politik. Harus ada garis merah nyata antara berpartisipasi per se dan berpartisipasi dengan kesadaran. Partisipasi saja mungkin suatu bentuk partisipasi semu, yang didirikan atas dasar mobilisasi. Partisipasi dengan kesadaran, di sisi lain, lebih berkontribusi untuk menciptakan perubahan mendasar dalam proses politik. Dalam konteks partisipasi, pemahaman semacam ini sangat penting. Selain itu, menganalisis segala bentuk partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan untuk memerintah Indonesia, khususnya penduduk setempat. Apakah atau tidak mereka memiliki korelasi langsung dengan kepentingan publik yang lebih luas, mereka harus dihargai secara proporsional, khususnya setelah penerapan otonomi lokal. Ini juga memainkan kritik menuju partisipasi yang adil di Indonesia, yang telah menyebabkan Indonesia menjadi ditinggalkan oleh negara maju karena politik luar biasa yang terakhir kesadaran. Pengembangan dapat berjalan dengan baik tergantung pada kekuatan pemerintah, tetapi hasilnya akan jauh lebih baik ketika pembangunan sepenuhnya mendapatkan dukungan dan partisipasi publik.

Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas tentang Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objeknya jelas berbeda jika sebelumnya peneliti meneliti bentuk partisipasi di Kab.Bulukumba, Sulawesi Selatan dan peneliti melakukan penelitian bentuk partisipasi masyarakat di Desa Sampung jika penelitian sebelumnya menggambarkan secara umum yaitu kebijakan yang ada di Indonesia sedangkan peneliti menjelaskan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan di tambang batu kapur di Desa Sampung.